

MENGENAL KPMM SUMATERA BARAT

Oleh Lusi Herlina

Sumber: BUKU KRITIK & OTOKRITIK LSM:

Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia (Hamid Abidin & Mimin Rukmini)

Halaman: 194-201

Latar Belakang dan Tujuan

Kebutuhan terhadap keberadaan sebuah konsorsium atau forum NGO/LSM di Sumatera Barat. Keberadaan konsorsium/forum diharapkan dapat menjadi wahana bagi NGO/LSM untuk berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, menjalin kerja sama dan membangun kekuatan bersama untuk mewujudkan masyarakat sipil. Setelah melalui proses yang pembahasan yang relative panjang, melibatkan 13 NGO/LSM di Sumatera Barat dari awal tahun 1999, pada tanggal 12 November 1999 dideklarasikan Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM). Keberadaan KPMM ini memiliki makna tersendiri, ditengah tantangan keberadaan forum LSM di Sumatera Barat yang survival.

Perwujudan masyarakat madani atau yang dikenal juga dengan civil society menjadi idaman kolektif dari masyarakat dunia. Dalam konteks implementasi riilnya juga menjadi tanggung jawab kolektif dari masyarakat itu sendiri.

Di awal berdirinya kegiatan KPMM lebih banyak mengadakan pertemuan-pertemuan/rapat untuk mendiskusikan dan membangun komitmen bersama dalam berjaringan. Pertemuan-pertemuan tersebut antara lain telah berhasil menyepakati tujuan, visi dan misi KPMM. Visi KPMM adalah mewujudkan masyarakat madani dalam terminologi KPMM merupakan masyarakat yang individu-individu dan institusinya memiliki komitmen dan kesadaran kolektif; memiliki nilai-nilai egalitarian, pluralistik, independen, penghargaan terhadap otoritas individu, bertanggung jawab, demokrasi, antikekerasan, antinepotisme, profesionalisme, peduli terhadap lingkungan dan berkeadilan. Dan diwujudkan dengan adanya supremasi hukum, kejujuran, transparansi dan akuntabilitas berkenaan dengan kepentingan publik, penghargaan terhadap segala bentuk perbedaan serta penghargaan terhadap segala bentuk perbedaan serta penghargaan terhadap segala keputusan yang diambil atas kesepakatan bersama.

Sedangkan maksud dan tujuan program adalah:

- Mengembangkan profesionalisme dan kemandirian lembaga-lembaga anggota konsorsium untuk mendorong terjadinya transformasi sosial menuju masyarakat madani.
- Mengembangkan pengetahuan dan kesadaran kritis masyarakat mengenai masalah-masalah sosial.
- Mendorong pengembangan ilmu dan teknologi yang berbasis kerakyatan.
- Mendorong terwujudnya diskursus-diskursus tentang masyarakat sipil.

- Mengembangkan manusia Indonesia agar mampu hidup sejahtera, adil dan bermartabat.
- Membangun jaringan dengan lembaga-lembaga lain dan atau institusi-institusi lain yang mempunyai visi yang sama dan sejalan dengan konsorsium.
- Menumbuhkan kepercayaan publik terhadap LSM/NGO.

Relevansi Transparansi dan Akuntabilitas Publik Bagi LSM

Dalam masa yang relatif panjang, keberadaan LSM di Indonesia-aspek transparansi dan akuntabilitas publiknya-belum memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh. Tema tentang hal ini mengemuka setelah munculnya berbagai ekses negatif dari semakin maraknya kehadiran LSM di Indonesia-termasuk di Sumatera Barat setelah era Reformasi. Keterbukaan yang terjadi dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk berlomba-lomba mendirikan LSM. Ketidakjelasan organisasi dan program telah menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat yang mengakibatkan lunturan kepercayaan publik terhadap NGO. Sering terjadi sebuah LSM tiba-tiba muncul dalam sebuah aksi atau aktivitas, namun kemudian tiba-tiba menghilang tanpa pertanggungjawaban. Dampak dari persoalan akhirnya ditanggung oleh masyarakat tempat mereka melakukan aktivitas/programnya.

Sorotan tajam kemudian banyak ditujukan kepada internal NGO governance. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar prinsip-prinsip dasar dari good governance. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip ini telah menimbulkan ketidakpuasan dan krisis kepercayaan terhadap NGO. Efektivitas peran LSM sebagai komponen masyarakat sipil tidak cukup hanya ditentukan oleh seberapa jauh perangkat hukum positif negara memberikan peluang, namun juga ditentukan oleh faktor-faktor internal LSM yaitu: penguatan diri melalui kapasitas manajemen, keterbukaan (disclosure) organisasi, dll. Hetifah Sjaifudin mengungkapkan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya, CSO di Indonesia mempunyai kendala yang menghambat laju gerakannya, yaitu:

- 1) Hambatan berkaitan dengan governance dalam tubuhnya sendiri seperti;
- 2) Hambatan yang menyangkut hubungannya dengan stakeholder lain, terutama pemerintah;
- 3) Lingkup pelayanannya dan kemampuan teknis yang terbatas dan;
- 4) Kendala untuk membangun sensitivitas gender dalam organisasi dan programnya.

Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi atau good NGO governance menjadi faktor yang menentukan dalam meraih kepercayaan publik. Kedua asas ini saling berkaitan. Akuntabilitas (accountability) kerap kali disebut akuntabilitas demokratik (democratic accountability) atau pertanggungjawaban demokratik (democratic responsibility) yang berakar dari pengetahuan dan pemahaman mengenai dua prinsip yang mendasar dari demokrasi yaitu paham mayoritas dan pemerintah oleh rakyat. Oleh karena itu secara mendasar akuntabilitas demokratik berbeda dengan akuntabilitas hierarkis terhadap atasan dalam organisasi. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan suatu badan (negara, perusahaan dan LSM) dengan tetap memperhatikan perlindungan hak azasi dan rahasia badan penyelenggara tersebut.

Perspektif transparansi dan akuntabilitas di atas masih perlu dikaji relevansi dan ketepatannya terhadap LSM/NGO. Pembahasan tentang hal ini masih berlangsung di KPMM, termasuk model yang akan dikembangkan.

Dinamika Organisasi dan Program KPMM

Di awal berdirinya KPMM lebih intens melakukan diskusi-diskusi untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama tentang visi, misi, dan program KPMM. Di samping merefleksikan keberadaan NGO/LSM sebagai sebuah organisasi publik. Secara umum kegiatan-kegiatan tersebut telah berhasil merumuskan bahwa tantangan NGO/LSM ke depan adalah menyangkut transparansi dan akuntabilitas publik LSM. KPMM diharapkan mendorong upaya-upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik LSM. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat penting bagi LSM/NGO sebagai sebuah lembaga publik. Pemenuhan terhadap kedua nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap LSM/NGO.

Pada masa kini KPMM pernah terlibat dalam kegiatan yang bersifat insidental, seperti hearing dengan DPRD, pernyataan sikap tentang pemilihan gubernur Sumbar dan pemantauan JPS yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan evaluasi dan refleksi bersama disepakati bahwa kegiatan-kegiatan di luar wacana transparansi dan akuntabilitas publik LSM dilaksanakan langsung oleh anggota. KPMM hanya fokus pada upaya-upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas publik internal LSM.

Di tingkat wacana komitmen anggota KPMM untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik semakin kuat. Kendala yang dihadapi ternyata tidak hanya semata-mata kemauan, tapi lebih dari itu adalah sering kali keterbatasan pengetahuan/pengalaman bagaimana memulainya dalam tindakan praktis. Karena itu upaya-upaya pengembangan pendekatan dan cara-cara praktis yang aplikatif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good NGO governance menjadi salah satu fokus KPMM.

Sebelum memulai pengkajian alternatif tindakan praktis, pada tahap pertama KPMM melakukan berbagai aktivitas diskusi/seminar dan lokakarya melibatkan multipihak dalam upaya mensosialisasikan ide-ide dan wacana tentang transparansi dan akuntabilitas dalam konteks NGO. Tema-tema yang dibahas dalam diskusi yang dilakukan secara reguler, antara lain: catatan tentang masyarakat madani, akuntabilitas NGO/LSM dan peluang gugatan masyarakat terhadap LSM, dan good NGO governance.

Sedangkan seminar/lokakarya yang melibatkan partisipan dari seluruh LSM-LSM dan komponen civil society lainnya di Sumatera Barat, di samping sebagai upaya membangun perhatian terhadap isu-isu transparansi dan akuntabilitas juga diharapkan menghasilkan komitmen bersama antara LSM-LSM di Sumatera Barat untuk saling bersinegi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik LSM. Sebagai sebuah konsep yang datang kemudian-bukan berasal dari pengalaman sendiri-rumusan dasar perlu dipahami bersama.

Di samping itu KPMM juga melakukan kegiatan studi banding yang diharapkan semakin memperkaya informasi dan pengalaman dari lembaga lain yang telah memulai upaya-upaya yang relatif sama dengan KPMM.

Sebagai acuan bagi KPMM dalam memulai aktivitasnya mendorong transparansi dan akuntabilitas publik LSM, dilakukan pemetaan keberagaman anggota untuk memperoleh gambaran menyeluruh meliputi aspek organisasi dan program dari masing-masing anggota KPMM dalam konteks transparansi dan akuntabilitas NGO/LSM. Pemetaan meliputi 10 anggota KPMM (PKBI Sumbar, Yayasan Citra Mandiri, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), Garda Era, Kabisat Indonesia, Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat (LP3ESM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, P3SD, Totalitas, dan scedei) yang dilakukan oleh dua orang tim riset independen dibantu oleh satu orang pendamping yang berasal dari lembaga anggota dengan sistem silang.

Secara khusus pemetaan dimaksudkan untuk: pertama, tergambarinya pemetaan keberagaman karakteristik anggota KPMM; kedua, teridentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi anggota KPMM dalam membangun transparansi dan akuntabilitas publik; ketiga, terumuskannya upaya-upaya yang akan dilakukan oleh KPMM dalam memperkuat anggota untuk membangun transparansi dan akuntabilitas publik. Beberapa aspek yang menjadi kajian dalam kegiatan ini adalah: latar belakang pemikiran dan ideologi berdirinya lembaga anggota, bentuk legalitas lembaga, implementasi dari artikulasi latar belakang pemikiran dan ideologi serta legalitas tersebut dalam aktivitas program secara empiris, kapasitas lembaga (dalam arti manajemen organisasi, SDM, keuangan, jaringan lembaga, sistem pendukung, dan program), pemahaman dan praktik transparansi dan akuntabilitas lembaga selama ini. Hasil pemetaan menyimpulkan bahwa bila digunakan konsep transparansi publik yang komprehensif dengan memperhatikan hak publik dan efektivitas dana, maka tingkat transparansi publik sebagian besar anggota KPMM adalah rendah.

Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh KPMM adalah monitoring dan evaluasi anggota dalam upaya mendorong penerapan transparansi dan akuntabilitas di masing-masing lembaga. Tahap awal disepakati unsur-unsur yang akan menjadi pokok perhatian antara lain: aspek organisasi: visi dan misi, struktur organisasi (pendiri, pengurus dan pelaksanaan harian), pola pengambilan keputusan, keberlanjutan program, keadilan dan kesetaraan gender, dan pengelolaan keuangan. Aspek program meliputi: perencanaan dan pelaksanaan program, sasaran pertanggungjawab. Monev dilakukan oleh Tim Monev yang terdiri dari anggota KPMM dan mitra KPMM.

Anggota KPMM telah menyatakan komitmen untuk saling terbuka dan saling memperkuat. Monev diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota KPMM dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya KPMM memfasilitasi proses berbagi untuk saling memperkuat di antara lembaga anggota. Peningkatan kapasitas lembaga menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan lembaga yang transparan dan akuntabel. Marschall mengemukakan, cara terbaik untuk memenuhi akuntabilitas publik adalah dengan meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi dan kinerja yang berstandar tinggi. Salah satu elemen strategis yang dituntut dalam penyelenggaraan good governance adalah peningkatan kemampuan teknis dan manajemen dalam akuntabilitas penyelenggaraan urusan publik.

Dalam konteks KPMM, peningkatan kapasitas lembaga anggota menjadi sangat relevan dan merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh KPMM saat ini dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggota KPMM.